PENGARUH KINERJA FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2006 – 2015

SKRIPSI

Oleh

Nama	:	Ryan Setya Budi
NomorMahasiswa	:	14313032
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PENGARUH KINERJA FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2006 – 2015

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Ryan Setya Budi
Nomor Mahasiswa	: 14313032
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Februari 2018

Penulis,



Ryan Setya Budi

PENGESAHAN

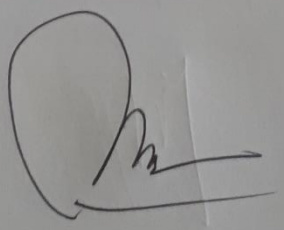
PENGARUH KINERJA FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2006 – 2015

Nama	: Ryan Setya Budi
Nomor Mahasiswa	: 14313032
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 11 Februari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembibing,



Jaka Sriyana,Dr.,SE.,M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KINERJA FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2006-2015

Disusun Oleh : **RYAN SETYA BUDI**

Nomor Mahasiswa : **14313032**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 14 Maret 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Heri Sudarsono, SE.,MEc

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin syukur ku kepada tuhan yang maha kuasa, doa selalu ku panjatkan agar mendapat ridho dan karuniaNya. Karya ini ku persembahkan untukmu ayahku ibuku dan adik tersayang yang selalu memberikan doa di setiap sholatnya, memberikan dukungan, motivasi dalam hidupku dan selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan tanggung jawabku sebagai putra ayah dan ibu. Ayah ibu terimalah persembahan karya skripsi ku ini, skirpsi ini yang akan menjadikan anak mu menjadi seorang sarjana ilmu ekonomi. Dan tak lupa seluruh Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Ilmu Ekonomi yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang sangat berarti untuk saya ke depannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dan para Staff Fakultas Ekonomi yang telah mebantu selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi.

MOTTO

"*watilka **a**l-amtsaalu nadhribuhaa li**l**nnaasi wamaa ya'qiluhaa illaa**a**l'aalimuun**a***"

(QS. Al-'Ankabuut [29] : ayat 43)

"Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya ; dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula"

(HR.Bukhari dan Muslim)

"Lakukan yang terbaik beroda dan hasil nya serahkan kepada tuhan"

(Ryan Setya Budi)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan. Sehingga dengan rahmat-Nya penulis dapat dan mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Kinerja Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2006 – 2015". Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat unuk meraih gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Semoga hasil ini bermanfaat untuk banyak pihak dan mendapatkan Ridha-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga semua bentuk kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini merupakan karya yang tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehinggi skripsi ini dapat tereselesaikan.
2. Kedua orang tua yaitu Haryana dan Endri Suryani yang telah memberikan kasih sayang, kebahagiaan, semangat dalam hidupku, nasihat, motivasi dan mendoakanku di setiap sholatya yang tidak akan akan pernah berhenti.
3. Sodara kandung saya adik saya yaitu Annisa Rahmayani Putri yang selalu memberikan semangat dalam hidup saya.
4. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektorat Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. D Agus Harjito, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indoneisa.

6. Bapak Jaka Sriyana, Dr., SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membantu membimbing dalam penyusunan skripsi dengan sabar.
7. Untuk Bogel Leboy (Adit, Dedy, Aji, Nawwaf dan Naufal) yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
8. Untuk Aji yang selalu memberikan inspirasi karena mendapat gelar wisuda tercepat sehingga menyemangati saya agar secepat nya menyelesaikan skripsi.
9. Untuk Dedy teman sebelah kamar yang selalu tanya skripsi dan memberikan motivasi mengerjakan skripsi agar di kerjakan.
10. Untuk Adit yang dua bulan magang di bank Indonesia dan rela meninggalkan skripsi nya menjadikan saya agar tidak kalah cepat selesai skripsi.
11. Untuk Nawwaf dan Naufal si kembar yang udah menyelesaikan skripsi nya duluan dan memberikan dorongan agar cepat menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga sumbang fikir dan koreksi akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah lanjut demi hasil yang lebih baik.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Amin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 11 Februari 2018

Penulis,

Ryan Setya Budi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN KATA PENGANTAR viii
HALAMAN DAFTAR ISI x
HALAMAN DAFTAR TABEL xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xv
HALAMAN Abstarct..... xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1.2.1 Tujuan Penelitian 6
1.3.2 Manfaat Penelitian 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II..... 9
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 9
2.1 Kajian Pustaka 9
2.2 Landasan Teori 15
2.2.1 Otonomi Daerah..... 15
2.2.2 Desentralisasi 16

2.2.3 Desentralisasi Fiskal 17
2.2.4 DAU (Dana Alokasi Umum) 18
2.2.5 PAD (Pendapatan Asli Daerah) 18
2.2.6 PDRB (Produk Domestik Regional Broto) 20
2.2.7 Jumlah Penduduk 22
2.2.8 Kemiskinan 24
BAB III 27
METODE PENELITIAN 27
3.1 Jenis dan Sumber Data 27
3.2 Definisi Operasional Variabel 28
3.3 Metode Penelitian 29
3.3.1 Metode Analisis kinerja fiskal 29
3.3.2 Analisis Regresi Data Panel 31
3.3.3 Spesifik Data Regresi 34
3.3.4 Uji Dalam Penelitian 35
BAB IV 39
HASIL DAN PEMBAHASAN 39
4.1 Deskripsi Data Penelitian 39
4.2 Diskripsi Objek Data Penelitian 39
4.2.1 Kemiskianan 39
4.2.2 Dana Alokasi Umum 39
4.2.3 Pendapatan Asli Daerah 40
4.2.4 Produk Domestik Regional Bruto 40
4.2.5 Jumlah Penduduk 40
4.3 Hasil dan Analisis Data 41

4.3.1 Estimasi Model *Common Effect Model* 41
4.3.2 Estimasi *Fixed Effect Model* 41
4.3.3 Estimasi *Random Effect Model* 42
4.4 Pemilihan Model 43
4.4.1 *Likelihood Ratio Test (Chow Test)* 44
4.4.2 Uji *Hausman Test* 45
4.5 Model Terbaik 46
4.5.1 Model *Fixed Effect* 46
4.6 Uji dalam penelitian 51
4.6.1 Koefisien Regresi (R^2) 51
4.6.2 Uji Statistik F 52
4.6.3 Uji Statistik t 52
4.7 Analisis dan Pembahasan 54
4.7.1 Analisis dana alokasi umum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta 54
4.7.2 Analisis pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta 55
4.7.3 Analisis Produk domestik regional bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta 56
4.7.4 Analisis jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta 57
4.7.5 Analisis kinerja fiskal terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta 58
5.1. Kesimpulan 59
5.2. Implikasi 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin …….5

Tabel 4.1 Estimasi *Output* Hasil Regresi Model *Common Effect* (CEM)……..…..41

Tabel 4.2 Estimasi *Output* Hasil Regresi *Fixed Effect Model*…….42

Tabel 4.3 Estimasi *Output* Hasil Regresi *Random Effect Model* ……43

Tabel 4.4 Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test* ……...…44

Tabel 4.5 Hasil Pengujian *Hausman Test*…….....46

Tabel 4.6. Hasil Regresi *Fixed Effect Model*…….....47

Tabel 4.7 Hasil Regresi Fixed Effects (Cross)…….....49

Tabel 4.8 Hasil Regresi Fixed Effects (Period).....50

Tabel 4.9 Hasil Regresi Pengujian Hipotesis…….....52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 3.1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model ……34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I. Estimasi *Output Hasil Regresi Common Effect Model* ……....…….65

II. Estimasi *Output* Hasil Regresi *Fixed Effect Model* ……66

III. Estimasi *Output* Hasil Regresi *Random Effect Model* ……...…….67

IV. Hasil Pengujian *Chow Test* ……...……..68

V. Hasil Pengujian *Hausmen Test* …….…..69

VI. Data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Miskin D.I Yogyakarta……..70

VII. Data Jumlah penduduk miskin (dalam ribu jiwa) pada tahun 2006-2015…...73

VIII. Data dana alokasi umum (dalam ribu rupiah) pada tahun 2006-2015……74

IX. Data Pendapatan Asli Daerah (dalam ribu rupah) pada tahun 2006-2015.….75

X. Data PDRB (dalam juta rupiah) harga berlaku pada tahun 2006-2015……..76

XI. Data Jumlah Penduduk (jiwa) pada tahun 2006-2015…….77

Abstarct

Abstract: the effect of fiscal performance on poverty in province d.i. Yogyakarta year 2006 - 2015. *Yogyakarta province has a fairly high number of poor people among the remote areas in Indonesia. The government has the authority in fiscal regulation to influence the condition of the community so it is necessary to be reviewed. The objectives of this study are to analyze the effect of fiscal performance variables such as general allocation fund, local revenue, gross regional domestic product and population to poverty in D.I Yogyakarta. The results show that the general allocation funds, local income, and the number of residents have a significant effect on poverty while the gross regional domestic product does not affect poverty. This certainly will be useful for decision makers in managing fiscal*.

Keywords: Poverty, Education, The Number of Graduation Participation, GRDP, and Inflation.

Abstrak: Pengaruh Kinerja Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2006 – 2015. Provinsi yogyakarta adalah provinsi yang memiliki hak otonomi khusus. Hal itu merupakan dampak dari otonomi dan desentralisasi. Keuangan pun juga ikut terkena dampak nya yang biasa nya di sebut fiskal daerah.Namun provinsi yogyakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi diantara daerah-daerah terpencil di indonesia. Pemerintah mempunyai wewenang dalam pengaturan fiskal untuk mempengaruhi kondisi masyarakat demikinan maka perlu di kaji. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh variabel kinerja fiskal seperti dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di D.I Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan produk domestik regional bruto tidak mempengaruhi kemiskinan. Hal ini tentu nya akan bisa bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam mengelola fiskal.

Kata kunci: Kemiskinan, DAU, PAD, PDRB , dan Jumlah Penduduk.

.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu dari empat daerah yang dikaruniai status keistimewaan oleh negara. Yogyakarta pun mempunyai keistimewaan juga, yakni daerah ini mempunyai aturan khusus dalam mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri, salah satunya adalah penetapan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dipilih langsung melalui pilkada, namun ditetapkan oleh DPRD provinsi. Yogyakarta sendiri mempunyai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai landasan yuridis. Dari pemaparan diatas, dapat kita kaitkan dengan adanya konsep otonomi daerah dan desentralisasi yang mulai banyak diterapkan di era reformasi. Tidak ada yang menafikkan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah agenda nasional yang penting. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Otonomi daerah memberikan otonomi yang luas kepada daerah baik provinsi, kabupaten atau kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususanserta potensi dan keanekaragaman dalam sistem. Namun seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, muncul beberapa kontroversi dalam masyarakat.

Sesusai dengan undang - undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari uraian definisi tersebut maka daerah akan memiki banyak pelimpahan urusan yang dahulu berada pada pusat sekarang pada daerah. Jika berbisacara otonomi daerah maka juga berbicara desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa "*Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."* Pada pelimpahan wewenang ini juga setelah lama diberlakukan nya otonomi masih butuh penyesuaian. Salah satu pelimpahan yang wewenang yang juga masih banyak terjadi penyusuaian adalah di bidang keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah. Untuk mendukung fungssi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyak nya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Ini yang disebut dengan pelimpahan wewenang di bidang keuangan oleh pusat ke daerah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal prinsip (rules) money should follow fuction merupkan salah satu prinsip yang harus

diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewengan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivtif dari kebijakan otonomi daerah pelimpahan sebagaian wewenang pemerintah dari pusat ke daerah. Arti nya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan , maka kecenderungan semakin besar biaya yang di butuhkan oleh daerah. Di dalam dana perimbangan tersebut porsi yang paling besar ada pada dana alokasi umum maka dana ini yang akan menjadi sebuah masalah uang muncul.

Dana alokasi umum yang biasa di singkat DAU adalah porsi terbesar transfer dari pusat ke daerah. Dana alokasi umum ini dalam APBD masuk dalam kategori pos dana perimbangan. Dana ini sendiri setiap periode mengalami perubahan formula untuk menetukan besaran nya. Dengan kata lain pada dana alokasi umum setiap periode besaran yang di terima tidak sama proporsi yang dengan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena formula penentu dana alokasi juga di kaji untuk mendapat kan formula yang pas agar tidak terjadi kesenjangan. Hal ini disebabkan karena pada waktu era sentralistik daerah yang mendapat anggaran tidak sesuai dengan kemampuan nya maka terjadi ketergantungan.

Dampak dari perubahan dana alokasi umum setiap tahun nya adalah tentu pada pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri terbagi menjadi 3 sub bagain, yang pertama adalah pendapatan asli daerah biasa disigkat PAD , dana

perimbangan dan pendapatan lain – lain yang sah. Karena dana alokasi umum masuk pada dana perimbangan maka du situlah porsi akan berkurang nya penerimaan daerah. Untuk mengukur ketergantungan fiskal maka di gunakan metode derajat otonomi fiskal/ derajat kemandirian fiskal. Metode ini berguna untuk seberapa besar besar tingkat ketergantungan daerah. Dengan ini masalah yang akan muncul berikut nya adalah pemerintah daerah akan semakin berlomba-lomba dalam meningkat kan pendapatan asli daerah. Penigkatan pendapatan asli daerah dengan menciptakan pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang dapat di gali di daerah. Karena peningkatan pad akan bergantung pada konsidi ekonomi dengan kata lain besaran pad akan tergatung pada produk domestik regional bruto yang biasa disebut pdrb.

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Konsdisi perekonomian di lihat dengan menggunakan indikator pdrb yang masih banyak di gunakan saat. Karena dengan melihat pdrb kita dapat mengetahui seberapa nilai tambah atas barang dan jasa yang di hasilkan. Banyak nya barang dan jasa yang dihasilkan juga dapat kita melihat bagai mana ekonomi suatu daerah tumbuh pada sektor mana. Jumlah barang dan jasa jika itu meningkat maka pendaptan daerah itu juta meningkat karena terdapat pajak di dalam nya. Tentunya peningkatan pdrb ini juga akan menghasilkan trade off antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ini adalah konsekuensi yang harus di

jaga pada tinggkat tertentu. Jika inflasi terlalu tinggi maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi D.I.Yogyakarta (000 Jiwa) Tahun 2011 – 2015

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	92.76	93.21	86.5	84.67	88.1
Bantul	159.4	158.8	159.2	153.5	160.2
Gunung Kidul	157.1	156.5	157.8	148.4	155
Sleman	117.3	116.8	118.2	110.4	111
Yogyakarta	27.7	37.6	37.4	35.6	36
D.I.Yogyakarta	564.3	562.1	565.7	532.6	550.2

Sumber : *Badan Pusat Statistik DIY (2011-2015)*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas di Provinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2011 – 2015 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sampai pada 2013 dan kembali menurun sampe 2015. Belum berhasil nya pemerintah menurunkan tingkat kemiskian ini bisa di teliti dengan kinerja fiskal daerah. Variabel-variabel penentu kinerja fiskal akan di cari hubungan nya dengan kemiskinan. Sehingga dengan melakukan penelitian ini akan di ketahui upaya pemerintah daerah dalam upaya mensejah terakan daerah nya lewat kinerja fiskal nya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kinerja fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2006 – 2015 ?
2. Bagaimana keterkaitan variabel – variabel yang mempengaruhi kinerja fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2006 – 2015 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji pengaruh kinerja fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2006 – 2015.
2. Mengkaji keterkaitan variabel – variabel yang mempengaruhi kinerja fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2006 – 2015.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini yang dicapai antara lain adalah :

1. Bagi Mahasiswa, untuk sebagai acuan dan dapat memahami kinerja fiskal dan permasalahan kemiskinan secara benar, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Bagi Masyarakat, untuk menambah pengetahuan agar dapat memahami kinerja fiskal dan hubugan dengan kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Bagi Pengambilan Kebijakan, penelitia ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja fiskal dan hubungan nya dengan kemikinan yang berada di Provinsi D.I. Yogyakarta.
4. Bagi Penulis, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan selama duduk dibangku perkuliahan, agar dapat menggetahui kinerja fiskal dan kemiskinan di lingkungan sekitar dan syarat untuk kelulusan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan dijelaskan secara singkat.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka yang merupakan penelitian yang sama terdahulu yang melandasi penelitian sekarang, landasan teori variabel-varibel yang diteliti, dan hipotesis penelitian perkiraan hasil serta menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional, variabel, jenis dan sumber data dan metode analis yang digunakan.

BAB IV. Analisis Data

Bab ini menguraikan deskripsi kinerja fiskal dan hasil regresi hubungan dengan kemiskinan tahun 2006 - 2015, analisis dan interpretasi ekonomi.

BAB V. Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja ekonomi dan angka kemiskinan di indonesia. Studi ini menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE), yang diformulasikan oleh Institusi Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). Hasilnya adalah simulasi menunjukkan, yang pertama, secara agregat, peningkatan pajak tidak langsung pendapatan pada rumah tangga pedesaan memiliki dampak negatif pada kinerja ekonomi makro. Kedua, peningkatan pajak tidak langsung telah menggabungkan beberapa dampak pada sektor yang bervariasi dan kelompok rumah tangga. Sektor industri manufaktur; dan perdagangan, hotel, dan restoran memiliki dampak negative dari peningkatan pajak tidak langsung. Ketiga, Peningkatan subsidi menghasilkan penurunan harga pada sektor tambang dan galian; manufaktur; dan listrik, gas, dan air. Keempat, dampak peningkatan transfer pendapatan kepada rumah tangga pedesaan menunjukan hasil campuran pada output, harga output, dan permintaan tenaga kerja. Peningkatan pendapatan meningkatkan permintaan output (Maipita, Janta, & Razak, 2010).

Pengaruh produk domestik bruto (pdb) dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap angka kemiskinan di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), dan indeks pembangunan manusia tentang kemiskinan di Indonesia. Analisis

menggunakan metode kuantitatif dengan metode Random Effect Model (REM) pada Panel Data dengan time series tahun 2006 sampai 2008. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di Indonesia dan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar signifikan negatif. pengaruh terhadap kemiskinan dengan variabel α 20%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan dengan α 5% (Suliswanto, 2010).

Meneliti tentang kinerja fiskal daerah: kasus kabupaten dan kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Analisis dengan metode DEA merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi yang menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Hasil nya adalah Kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal masih sangat tinggi dengan kata lain kemandirian fiskal masih rendah. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi selama periode 2007-2009 relatif baik, dengan tingkat pencapaian hampir 100%. Analisis kinerja fiskal yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan adanya hasil yang sangat bervariasi di kot/kabupaten di di provinsi DI Yogyakarta. Kota Yogyakarta menunjukkan kinerja fiskal yang relative lebih baik dari kabupaten lainnya (Sriyana, 2011).

Dengan judul penelitan pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990 – 2008. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk miskin di Indonesia kurun waktu 1990-2008. Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dengan memperlakukan jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikat, sedangkan petumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia selama periode 1990 sampai 2008 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1995 sebesar 8,57 % dan terendah pada tahun 2005 sebesar 0,47 %. Sedangkan jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuasi dan berdasarkan indeks keparahan ternyata wilayah pedesaan cendrung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih parah dari pekotaan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDB dan Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan alfa masing – masing 0,05 dan 0,01. Untuk uji F terlihat kedua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (tingkat kemiskinan) pada alfa 0,01. Sedangkan nilai R2 sebesar 59,75 persen. artinya kemampuan model menjelaskan variabel dependen sebesar angka tersebut, sisanya sebesar 40,25 persen di jelaskan oleh variabel lain (Mustika, 2011).

Penelitian dari santosa bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan, tingkat pengangguran, dan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sampel yang digunakan adalah data 33 provinsi di Indonesia pada periode 2007-2011. Metode analisis yang digunakan adalah Path Analysis. Hasil penelitian ini adalah bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, PAD dan DAU memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran regional, namun DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran lokal. PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah ini, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran lokal dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan analisis secara langsung terhadap masing-masing variabel tersebut, maka secara tidak langsung terdapat pengaruh yang baik PAD, DAU, DAK, atau DBH terhadap pengangguran dan pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.(Santosa, 2013)

Jurnal Dampak kapasitas fiskal terhadap penurunan kemiskinan : suatu analisis simulasi kebijakkan. Data yang di gunakan adalah panel 23 provinsi dan 391 kabupaten/kota tahun 2005 - 2011 meliputi data realisasi fiskal, data perekonomian, dan data kemiskinan. Model persamaan simultan dinamis merupakan model ekonometrik yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran menggunakan variabel-variabel yang relevan dalam tataran teori ekonomi, konsep, dan kajian studi-studi empiris terdahulu. Hasil nya adalah pertama, ada

fenomena flypaper effect yang ditunjukkan oleh nilai elastisitas belanja industri dan belanja perdagangan lebih besar daripada kapasitas fiskal, elastisitas belanja pertanian dan belanja infrastruktur terhadap kapasitas fiskal lebih besar daripada DAU. Hasil kedua tingkat kemiskinan (headcount index) pertanian, industri, dan perdagangan dipengaruhi pengeluaran untuk konsumsi (pengeluaran per kapita) dan ketimpangan pendapatan (indeks Gini). Hasil ketiga hasil estimasi model menunjukkan pengeluaran per kapita akan meningkat jika upah riil tenaga kerja sektoral meningkat (Lisna, Sinaga, Firdaus, & Sutomo, 2013)

Penelitian dengan judul analisis pengaruh pengangguran, produk domestik regional bruto (pdrb), dan indeks pembangunan manusia(ipm) terhadap jumlah penduduk miskin menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tiga variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan variabel independen adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran baik secara simultan maupun secara parsial. Teori kemiskinan, pertumbuhan PDRB dan IPM dengan model Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan

IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan(Cholili, 2014).

Penelitian tentang kapasitas fiskal dan pengentasan kemiskinan : sebuah analisis data panel untuk daerah istimewa yogyakarta. Pendekatan yang di gunakan adalah data panel dengan kurun waktu 2013 – 2016 dengan mencakup 4 kabupaten dan kota. Dengan model efek tetap dapat menjelaskan dengan baik pengaruh kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan. Hasil nya adalah belanja publik dan transfer fiskal merupakan variable penentu untuk tingkat kemiskinan, sebaliknya pendapatan asli daerah (PAD) sendiri memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan kapasitas fiskal di antara kabupaten dan kota di Yogyakarta telah berhasil dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan social (Sriyana, 2015).

Analisis kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal kabupaten lamongan tahun 2009-2013. Penelitian ini Untuk Digunakan Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Lamongan. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif komparatif kualitatif berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber resmi sedangkan sampel yang digunakan adalah untuk periode 2009-2013 . alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode \ kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal di Kabupaten Lamongan. Hasil analisis jawaban yang diperoleh bahwa kebutuhan fiskal sangat hight dan fluktuaktif tentang perkembangan anggaran antara kapasitas fiskal sangat baik (Chodariyanti, 2015)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah:

1. Hak.
2. Wewenang.
3. Kewajiban Daerah Otonom.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU NO 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Desentralisasi

Desentralisasi adalah berkurang nya atau diserahkan nya sebagian atau seluruh wewenang pemerintah dari pusat ke daerah-daerah. Sehingga daerah yang menerima kewenangan bersifaat otonom yakni dapat menetukn cara nya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas(Saragih, 2003).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa "*Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."* Sesuai dengan pengertiannya, desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya

penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah.

2.2.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemrintah dan pelayanan public sesuai dengan banyak nya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow fuction merupkan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewengan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivtif dari kebijakan otonomi daerah pelimpahan sebagaian wewenang pemerintah dari pusat ke daerah. Arti nya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan , maka kecenderungan semakin besar biaya yang di butuhkan oleh daerah. Namun dalam pengelolaan pembiyaan tugas desentralisasi, prinsip efisiensi juga menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Anggaran untuk pelaksanaan tugas – tugas pemerintah atau pelayanan publik di kelola secara efisien, namun menghasilkan output yang maksimal (Saragih, 2003).

2.2.4 DAU (Dana Alokasi Umum)

DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi dana pusat ke daerah dalam bentuk DAU merupakan trasfer yang bersifat *block grant*s dengan kata lain DAU juga merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Karena semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizon fiscal imbalance*). Dan yang menjadi besar kecil nya dau yang akan di berikan tergantung beberapa faktor yang setiap periode berubah formulanya(Saragih, 2003).

2.2.5 PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Sumber Pendapatan Asli Daerah :

1) Hasil Pajak Daerah;

   Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Hasil Retribusi Daerah;

   Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

   Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa,

pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

4) Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

A. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
B. Jasa giro
C. Pendapatan bunga
D. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2.6 PDRB (Produk Domestik Regional Broto)

Dalam metode nya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan yang berwenang dalam kajian statistik di indonesia mendefinisikan PDRB dan metodologi nya sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit

produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
b. Pertambangan dan Penggalian
c. Industri Pengolahan
d. Listrik, Gas dan Air Bersih
e. Konstruksi
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
g. Pengangkutan dan Komunikasi
h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
b. pengeluaran konsumsi pemerintah
c. pembentukan modal tetap domestik bruto
d. perubahan inventori, dan
e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

2.2.7 Jumlah Penduduk

Dalam metode nya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan yang berwenang dalam kajian statistik di indonesia mendefinisikan jumlah penduduk dan metodologi nya sebagai berikut :

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Beberapa cara menghitung jumlah penduduk antara lain :

1. Sensus Penduduk

   Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel.informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

2. Survey Penduduk Antar Sensus

   Survey penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.

3. Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi, khususnya fertilitas, keluarga berencana dan mortalitas. Rumah tangga terpilih diwawancara untuk tujuan ini.

4. Registrasi Penduduk.

   Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan kedalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini(dilakukan oleh kementrian dalam negeri) menggunakan pendekatan de jure . Sensus penduduk dan registrasi penduduk mencakup semua wilayah geografi Indonesia.Pada sensus penduduk 1971, informasi lengkap dikumpulkan dari 3.8 persen dari total rumah tangga kecuali timor timur, dimana pada tahun 1980 dan 1990 informasi yang sama dikumpulkan dari 5 persen dari total rumah tangga atau sekitar 2 juta rumah tangga.

2.2.8 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan sumber daya yang di miliki seperti ; makan, pakaian, tempat perlindungan dan air minum, sumber daya alam, sumber daya manusia hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan ekonomi dilihat

dari aspek ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok penduduk (Rahmawati, 2016).

Menurut BPS (Badan Pusat Statistika) definisi dan metode perhitungan nya sebagai berikut :

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Metode pemilian sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah SUmatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota

secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT)pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Berdasar kan jenis nya data terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang memiliki satuan/numerik, sedangkan data kualitatif merupakan data suatu atribut yang yang membedakan dua sifat suatu obyek penelitian (Sriyana, 2014).

Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (000) menurut kabupaten/kota se DIY Tahun 2006 - 2015 BPS dan kementrian keuangan.
2. Pendapatan Asli Daerah (000) menurut kabupaten/kota se DIY Tahun 2006-2015 BPS dan kementrian keuangan.
3. Produk Domestik Regional Bruto (000.000) menurut kabupaten/kota se DIY Tahun 2006-2015 BPS.
4. Jumlah Penduduk (000) menurut kabupaten/kota se DIY Tahun 2006-2015 BPS
5. Kemiskinan (000) menurut kabupaten/kota se DIY Tahun 2006-2015 BPS

Dari data di atas pada penelitian ini menunjukkan karakteristik data menurut ketersediaan nya adalah panel karena merupakkan gabungan dari data time series dan data antar unit.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kemiskinan yang dimana sebagai variabel terikat (dependent variabel), sedangkan pada variabel bebasnya (independent variabel) adalah dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, perhitungan dan kreteria berdasar kan badan pusat statistik.

Dana alokasi umum selanjuat nya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi beberapa lapangan usaha (sektor).

Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Perhitungan jumlah penduduk setiap tahunnya menggunakan proyeksi dari sensus penduduk setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Metode Analisis kinerja fiskal

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa di ukur melalui kinerja / kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa Analisis kinerja keuangan daerah diantaranya: 1)desentralisasi fiskal, 2) kebutuhan fiskal, 3) kapasitas fiskal (Chodariyanti, 2015).

1. Derajat otonomi fiskal / derajat kemandirian fiskal daerah diukur dengan menggunakan ukuran seperti rasio penerimaan yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Apabila hasil PAD terhadap total penerimaan daerah tinggi, berarti derajat otonomi fiskal daerah tinggi, dan hal sebaliknya berlaku.

2. Kapasitas fiskal daerah *(fiscal capacity),* Cj, diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$Cj = \frac{PDRBj / POPj}{SFC}$$

dimana;

PDRBj = produk domestik regional bruto dari seluruh kabupaten/kota dari provinsi yang diteliti.

POPj = jumlah penduduk dari kabupaten/kota di provinsi

SFC = standar kapasitas fiskal, yang dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$SFC = \frac{\sum PDRB}{\sum POP}$$

dimana;

Σ PDRB = jumlah PDRB dari seluruh kabupaten/kota dari provinsi yang diteliti

Σ POP = jumlah penduduk dari seluruh kabupaten/kota dari provinsi yang diteliti,

3. Kebutuhan fiskal daerah *(fiscal needs)* Nj, diukur menggunakan formul sebagai berikut :

$$Nj = \frac{TPEKj / POPj}{SFN}$$

dimana;

TPEKj = total pengeluaran (pengeluaran rutin ditambah pengeluaran pembangunan) dari kabupaten/kota dari provinsi yang diteliti.

SFN = standar kebutuhan fiskal, yang dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$SFN = \frac{\sum TPEK}{\sum POP}$$

dimana;

Σ TPEK = jumlah pengeluaran dari seluruh kabupaten/kota provinsi yang diteliti.

3.3.2 Analisis Regresi Data Panel

Untuk mencapai tujuan penelitian dan penguji hipotesis, penelitian ini menggunakan model regresi data panel, pada regresi data panel ada gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda maka

dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Ada tiga metode yang digunakan untuk mengestimasi data panel yaitu : Pengujian hipotesis estimasi dalam penelitian ini meliputi pengujian secara Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect :

1. Common Effect atau Pooled Least Square (PLS)

   Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section kedalam data panel. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Setelah menggabungkan *cross-section* dan *time series* kemudian menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

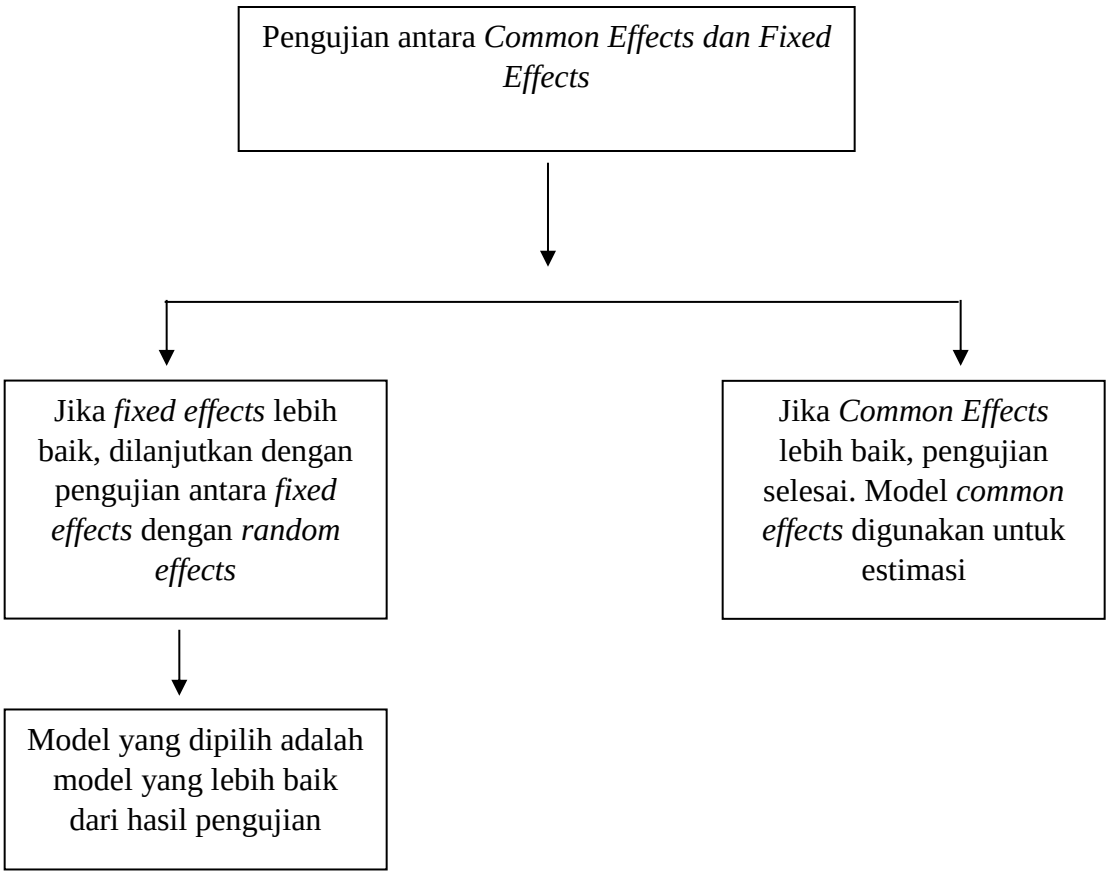
2. Fixed Effect Model (FE)

   Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV).

3. Random Effect

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS) .

Dengan menggunakan model efek acak ini maka akan dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap (Sriyana, 2014).



Sumber : (Sriyana, 2014)

Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model

3.3.3 Spesifik Data Regresi

Dari kerangka pemikiran diatas, analisis data dibatasi pada 5 variabel, diantaranya kemiskinan, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk.

Secara ekonometrika hubungan antara dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk terhadap

kemiskinan di Provinsi D.I.Yogyakarta dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi data panel secara umum :

Persamaan Model → MSKNit = βo + DAU1it + PADit + JPit + PDRB it + e it

MSKN = jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)

DAU = Dana Alokasi Umum (ribu rupaih).

PAD = Pendapatan Asli Daerah (ribu rupaih).

PDRB = Pengeluaran pemerintah (juta rupiah).

JP = Jumlah Penduduk (ribu orang).

i = banyaknya individu (5 kabupaten/kota DIY)

t = banyaknya waktu (periode 2006-2015)

3.3.4 Uji Dalam Penelitian

3.3.4.1 Koefisien Regresi

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R *Square*.Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi bergenda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

Hasil perhitungan *Adjusted* R^2 dapat dilihat pada output *Model Summary*. Pada kolom *Adjusted* R^2 dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

3.3.4.1 Uji Statistik F

Uji F ini dimaksudkan untuk dapat melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

a. Jika probabilitas (signifikansi)> 0,05 (α) atau F hitung < F tabel berarti hipotesis tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak bila dilakukan secara simultan.

b. Jika probabilitas (signifikansi)< 0,05 (α) atau F hitung > F tabel berarti hipotesis terbukti maka H0 ditolak dan Ha diterima bila dilakukan secara simultan.

3.3.4.1 Uji statistik t

Uji T pada dasarnya adalah suatu pengujian untuk melihat apakah nilai tengah (nilai rata-rata) suatu distribusi nilai (kelompok) berbeda secara nyata (*siginificant)* dari nilai tengah dari distribusi nilai (kelompok) lainnya. Uji t ini juga dapat melihat dua beda nilai koefisien korelasi.

Untuk melakukan pengujian t maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \beta n / S\beta n$$

Dimana :

t : mengikuti fungsi t dengan derajat kebebasan (df).

βn : koefisien regresi masing-masing variabel.

Sβn : standar error masing-masing variabel.

Dasar pengambilan keputusan:

a. Jika probabilitas (signifikansi)> 0,05 (α) atau T hitung < T tabel berarti hipotesa tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila dilakukan uji secara parsial.

b. Jika probabilitas (signifikansi)< 0,05 (α) atau T hitung > T tabel berarti hipotesa terbukti maka H0 ditolak dan Ha diterima, bila dilakukan uji secara parsial

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil pengaruh kinerja fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi D.I.Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS (Badan Pusat Statistika) dari berbagai publikasi. Jenis data yanng digunakan adalah data panel dari penelitain ini terdiri dari cross section dan time series. Cross section nya adalah kabupaten dan kota di di Provinsi D.I.Yogyakarta. Sedangkan time series nya dari tahun 2006 sampai 2015. Variabel - variabel yang di gunakan untuk menghitung kinerja fiskal antara lain dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi D.I.Yogyakarta.

4.2 Diskripsi Objek Data Penelitian

4.2.1 Kemiskianan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, perhitungan dan kreteria berdasar kan badan pusat statistik.

4.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum selanjuat nya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar- daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

4.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

4.2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi beberapa lapangan usaha (sektor).

4.2.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Perhitungan jumlah penduduk setiap tahunnya menggunakan proyeksi dari sensus penduduk setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

4.3 Hasil dan Analisis Data

4.3.1 Estimasi Model *Common Effect Model*

Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Common Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Estimasi *Output* Hasil Regresi Model *Common Effect* (CEM)

Dependent Variable: KMIS?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/16/17 Time: 10:42
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.245984	10.78987	-0.115477	0.9086
DAU?	1.70E-07	2.61E-08	6.528221	0.0000
PAD?	-9.99E-08	3.49E-08	-2.863235	0.0063
PDRB?	-3.07E-06	8.09E-07	-3.802438	0.0004
JP?	9.24E-05	1.43E-05	6.447523	0.0000

R-squared	0.804467	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.787086	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	20.08500	Akaike info criterion	8.932463
Sum squared resid	18153.32	Schwarz criterion	9.123665
Log likelihood	-218.3116	Hannan-Quinn criter.	9.005274
F-statistic	46.28496	Durbin-Watson stat	0.893750
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews 9.

4.3.2 Estimasi *Fixed Effect Model*

Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Estimasi *Output* Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: KMIS?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/09/18 Time: 10:54
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.24569	42.67967	1.950476	0.0599
DAU?	2.25E-07	8.36E-08	2.693669	0.0112
PAD?	-1.32E-07	3.14E-08	-4.216301	0.0002
PDRB?	1.72E-06	1.02E-06	1.685994	0.1015
JP?	-0.000150	6.15E-05	-2.444716	0.0202

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.926593	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.887596	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	14.59353	Akaike info criterion	8.472746
Sum squared resid	6815.075	Schwarz criterion	9.161075
Log likelihood	-193.8187	Hannan-Quinn criter.	8.734866
F-statistic	23.76046	Durbin-Watson stat	1.673220
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9

4.3.3 Estimasi *Random Effect Model*

Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Estimasi *Output* Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: KMIS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/16/17 Time: 12:26
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.245984	8.160291	-0.152689	0.8793
DAU?	1.70E-07	1.97E-08	8.631883	0.0000
PAD?	-9.99E-08	2.64E-08	-3.785887	0.0005
PDRB?	-3.07E-06	6.12E-07	-5.027740	0.0000
JP?	9.24E-05	1.08E-05	8.525180	0.0000

R-squared	0.804467	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.787086	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	20.08500	Sum squared resid	18153.32
F-statistic	46.28496	Durbin-Watson stat	0.893750
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.804467	Mean dependent var	108.8202
Sum squared resid	18153.32	Durbin-Watson stat	0.893750

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9

4.4 Pemilihan Model

Pemilihan model di lakukan agar memperoleh model yang sesuai. Data yang dianalisis menggunakan data panel, maka harus menentukan model analisis data penal yang sesuai agar dapat menghasilkan model yang sesuaian. Model data panel antara lain *common effect model, fixed effect model, dan random effect model*. Uji yang di lakukan antara lain dengan uji *Chow* untuk menentukan antara

common effect model atau *fixed effect model.* Sedangkan uji Hausman untuk menentukan antara *fixed effect model* atau *random effect model* sehingga akan dihasilkan model yang baik dan analisa yang akurat.

4.4.1 *Likelihood Ratio Test (Chow Test)*

Uji *chow test* ini dilakukan pada tahapp awal untuk memilih model diantara menggunakan *common effect model* atau *fixed effect model*. Hipotesis dari *chow test* adalah sebagai berikut :

H_0: Menggunakan *Common Effect Model*

H_1: Menggunakan *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis (H_0) adalah apabila nilai Cross-section F < alpha (0,05). Maka artinya adalah *fixed effect model* lebih baik digunakan dari pada menggunakan *common effect model* dan berlaku juga sebalik nya.

Hasil *Likelihood Ratio Test* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FEM
Test cross-section and period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.257856	(4,32)	0.0001
Cross-section Chi-square	35.456736	4	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9, 2016.

Berdasarkan hasil pengujian di atas pada tabel diperoleh angka probabilitas *Cross-section* F sebesar 0,0001 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai prob lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan dari uji *Chow test* adalah menolak H_0, sehingga *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan dari pada menggunakan *Common Effect Model*.

4.4.2 Uji *Hausman Test*

Uji ini dilakukan setelah uji *Chow test* dengan hasil *Fixed Effect Model* merupakan hasil terbaik sehingga perlu di lakukan *Hausman Test* . pada tahap ini untuk memilih menggunakan model antara *fixed effect model* atau *random effect mode*. Untuk melakukan uji ini maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0: Menggunakan *Random Effect Model*

H_1: Menggunakan *Fixed Effect Model*

Dalam uji ini, akan dibandingkan antara hipotesis H_0 yang menyatakan bahwa menggunakan *random effect mode* yang lebih baik. Dan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa menggunakan *fixed effect model* lebih baik. Hipotesis nol (H_0) diterima jika nilai prob Cross-section random lebih kecil (<) dari nilai *alpha* yang digunakan. Hal ini berarti bahwa model *random*

effect lebih baik untuk melakukan regresi data panel dari pada model *fixed effect*.

Hasil pengujian *Hausman Test* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Pengujian *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: REM Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.674468	4	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9,

Dari hasil olah data pada tabel menunjukkan bahwa nilai Cross-section random yang diperoleh pada uji *hausman* tersebut memiliki probablilitas sebesar 0,0000 < α = 5% (0,05). Berarti dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolah maka estimasi *Fixed Effect Model* lebih baik dari pada metode *Random Effect Model*.

4.5 Model Terbaik

4.5.1 Model *Fixed Effect*

Hasil pengujian regresi Uji *Chow* dengan Uji *Hausman*, model terbaik adalah dengan menggunakan *Fixed Effect Model* hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: KMIS?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/16/17 Time: 12:20
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.24569	42.67967	1.950476	0.0599
DAU?	2.25E-07	8.36E-08	2.693669	0.0112
PAD?	-1.32E-07	3.14E-08	-4.216301	0.0002
PDRB?	1.72E-06	1.02E-06	1.685994	0.1015
JP?	-0.000150	6.15E-05	-2.444716	0.0202
Fixed Effects (Cross)				
_YK--C	-76.88362			
_SL--C	41.17184			
_BA--C	56.73814			
_KP--C	-36.54562			
_GK--C	15.51926			
Fixed Effects (Period)				
2006--C	42.92472			
2007--C	18.61616			
2008--C	4.849217			
2009--C	23.80605			
2010--C	15.73420			
2011--C	2.305400			
2012--C	-12.96140			
2013--C	-31.00710			
2014--C	-33.72402			
2015--C	-30.54322			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.926593	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.887596	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	14.59353	Akaike info criterion	8.472746
Sum squared resid	6815.075	Schwarz criterion	9.161075
Log likelihood	-193.8187	Hannan-Quinn criter.	8.734866
F-statistic	23.76046	Durbin-Watson stat	1.673220
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews v.9

Model regresi *fixed effect* sebagai berikut :

MSKNit = βo + β1 DAUit + β2 PADit + β3 JPit + β4 PDRB it + e it

MSKN = 83.24569 + 2.25E-07DAU - 1.32E-07PAD + 1.72E-06 PDRB -
0.000150JP + eit

Keterangan :

MSKN = Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)

DAU = Dana Alokasi Umum (ribu rupiah).

PAD = Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah).

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah).

JP = Jumlah Penduduk (ribu orang).

βo = Konstanta

β1-β4 = Koefisien

i = Banyaknya Individu (5 kabupaten/kota DIY)

t = Rentang Waktu (periode 2006-2015)

YK = Yogyakarta

SL = Sleman

BA = Bantul

KP = Kulon Progo

GK = Gunung Kidul

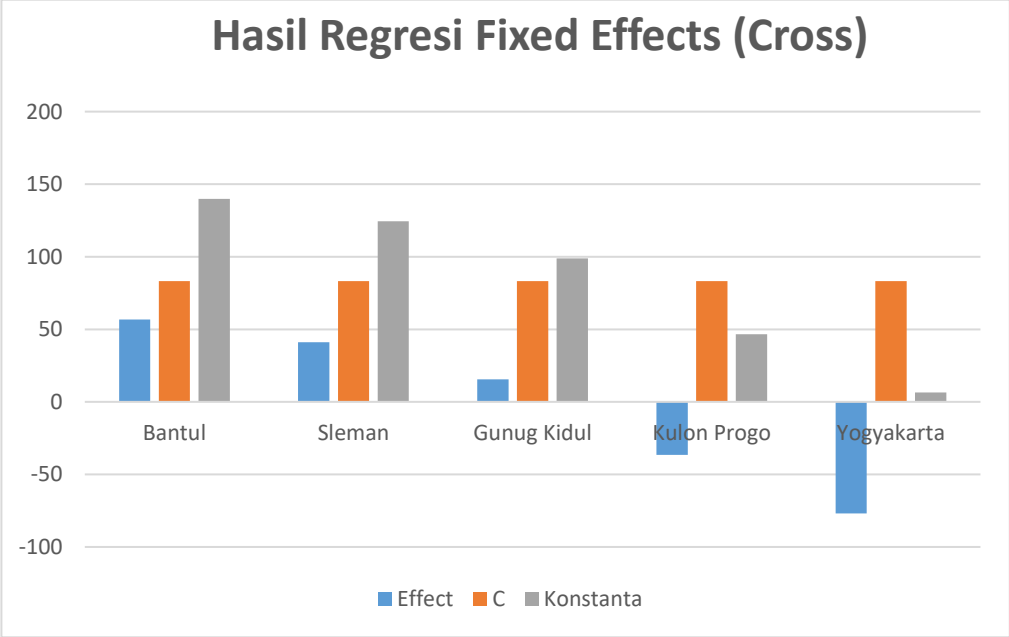
Berikut ini adalah hasil regresi Fixed Effects (cross) :

Tabel 4.7

Hasil Regresi Fixed Effects (Cross)

Urutan Dari Tinggi Ke Rendah	Daerah	Effect	C	Konstanta
1	Bantul	56,73814	83,24569	139,98383
2	Sleman	41,17184	83,24569	124,41753
3	Gunug Kidul	15,51926	83,24569	98,76495
4	Kulon Progo	-36,54562	83,24569	46,70007
5	Yogyakarta	-76,88362	83,24569	6,36207

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9



Sumber : Penulis (di olah dengan tampilan diagram batang)

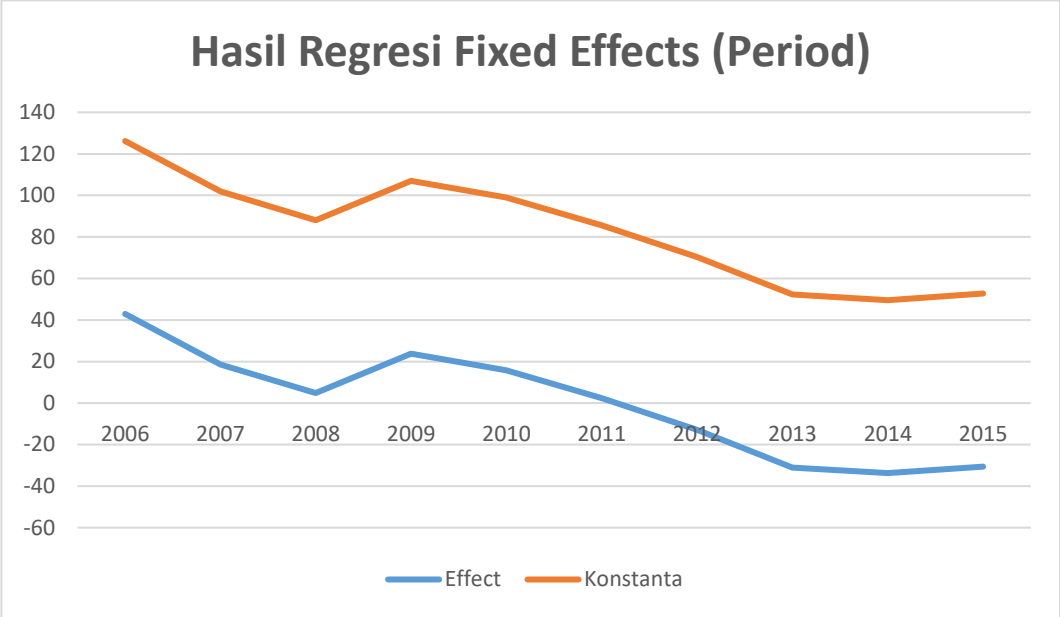
Pada tabel menunjukkan konstanta masing-masing kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta dari (5 kabupaten/kota). Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk miskin tertinggi setelah melihat efek cross nya sebesar 56.73814, kemudian untuk kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit setelah melihat efek cross adalah Kota Yogyajarta sebesar -76.88362.

Tabel 4.8

Hasil Regresi Fixed Effects (Period)

Urutan Dari Tinggi Ke Rendah	Tahun	Effect	C	Konstanta
1	2006	42,9247	83,24569	126,1704
2	2009	23,8061	83,24569	107,0517
3	2007	18,6162	83,24569	101,8619
4	2010	15,7342	83,24569	98,9799
5	2008	4,8492	83,24569	88,0949
6	2011	2,3054	83,24569	85,5511
7	2012	-12,9614	83,24569	70,2843
8	2015	-30,5432	83,24569	52,7025
9	2013	-31,0071	83,24569	52,2386
10	2014	-33,7240	83,24569	49,5217

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.9



Sumber : Penulis (di olah dengan tampilan grafik)

Pada tabel menunjukkan konstanta masing-masing kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2006 - 2015. Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2016 dengan jumlah penduduk miskin tertinggi setelah melihat efek cross nya sebesar 42.92472, kemudian untuk tahun yang memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit setelah melihat efek period adalah tahun 2014 sebesar -33.72402.

4.6 Uji dalam penelitian

4.6.1 Koefisien Regresi (R^2)

Nilai koefisien regresi merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R^2 mendekati angka 1, maka variabel- variabel independen semakin besar dapat menjelaskan variabel

dependen jadi dapat dikatakan model tersebut baik. Berdasarkan hasil pengujian pada model terbaik yaitu *fixed effect model* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.926593 yang berarti menunjukkan bahwa sebanyak 92,65% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya (7,35%) dijelaskan oleh variabel model yang lain.

4.6.2 Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil nya didapatkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 < α = 5% (0,05), artinya signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen.

4.6.3 Uji Statistik t

Tabel 4.9

Hasil Regresi Pengujian Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.24569	42.67967	1.950476	0.0599
DAU?	2.25E-07	8.36E-08	2.693669	0.0112
PAD?	-1.32E-07	3.14E-08	-4.216301	0.0002
PDRB?	1.72E-06	1.02E-06	1.685994	0.1015
JP?	-0.000150	6.15E-05	-2.444716	0.0202

Sumber : Olah Data Eviews v.9

Berdasarkan hasil di atas dari hasil regresi menggunakan *fixed effect model* maka maka dapat disimpulkan bahwa :

1. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dari hasil uji signifikasi didapat probabilitas sebesar 0.0112 < α = 5% (0,05), artinya adalah signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana alokasi umum memiliki nilai koefisien sebesar 2.25E-07 serta mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika dana alokasi umum bertambah seribu rupiah (Rp. 1.000) maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 2.25E-07 0.000000 ribu jiwa.

2. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dari hasil uji signifikasi didapat probabilitas sebesar 0.0002 < α = 5% (0,05), artinya adalah signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien sebesar 1.32E-07 serta mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika pendapatan asli daerah bertambah seribu rupiah maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1.32E-07 ribu jiwa.

3. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dari hasil uji signifikasi didapat probabilitas sebesar 0.1015 < α = 10% (0,10), artinya adalah tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap jumlah

penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Pdrb memiliki nilai koefisien sebesar 1.32E-07 serta mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika PDRB bertambah 1 juta rupiah maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1.32E-07 ribu jiwa tidak memiliki pengaruh.

4. Jumlah Penduduk (JP)

Dari hasil uji signifikasi didapat probabilitas sebesar 0.0202 < α = 5% (0,05), artinya adalah signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Jumlah penduduk memiliki nilai koefisien sebesar 0.000150 serta mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika Jumlah penduduk bertambah seribu jiwa maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.000150 ribu jiwa.

4.7 Analisis dan Pembahasan

4.7.1 Analisis dana alokasi umum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta

Hasil dari regresi data panel pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan dana alokasi umum signifikan dan berpengaruh secara positif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika dana alokasi umum meningkat maka akan berpengaruh meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta.

Hasil diatas sesuai dengan penelitian yang dijelaskan oleh (Santosa, 2013) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemiskinan menggunakan analisa jalur. Dana alokasi umum sebagai instrumen pemerintah dalam menjalankan transfer fiskal ke daerah. Dana ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah dengan pemerataan ekonomi sehingga kesenjangan antar daerah dapat mengecil dan tercipta kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik. Namum pertumbuhan ekonomi akan memicu permasalahan jika tidak terkendali. Pada teoori nya pertumbuhan ekonomi akan mengakibat kan pengganggguran. Jika di biarkan terus menerus maka akan terjadi kemiskinan. Jadi pemerintah harus memperhatikan besaran dana alokasi umum dan tujuan pengalokasi nya harus sesuai dengan target yang akan dicapai.

4.7.2 Analisis pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta

Hasil dari regresi data panel pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan pendapatan asli daerah signifikan dan berpengaruh secara negatif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika pendapatan asli daerah meningkat maka akan berpengaruh penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta.

Hasil tersebut sama seperti yang di paparkan oleh(Santosa, 2013), dalam penelitian nya menyebutkan pendapatan asli daerah memepengaruhi

kemiskinan menggunakan analisa jalur. Maka dari penelitian itu kita dapat menyimpulkan jika pendapatan asli daerah naik tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan yang ada. Jadi pendapatan asli daerah tidak secara langsung akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di mungkinkan tahapan yang dilalui sehingga berdampak pada jumlah penduduk miskin.

4.7.3 Analisis Produk domestik regional bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta

Hasil dari regresi data panel pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan Produk domestik regional bruto hampir signifikan dan berpengaruh secara positif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika pdrb meningkat maka akan berpengaruh meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cholili, 2014), pada penelitian tersebut di menyatakan bahwa Produk domestik regional bruto berpengruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini terjadi karena lingkup dan tahun yang di teliti berbeda. Jika mengacu pada teori pendapatan regional domestik bruto adalah sebagai indikator perhitungan pertumbuhan ekonomi maka teori nya jika pertumbuhan ekonomi peningkat akan peningkat kan pengganggguran. Dan pengganggguran akan menjadikan kemiskinan.

4.7.4 Analisis jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta

Hasil dari regresi data panel pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan jumlah penduduk signifikan dan berpengaruh secara positif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika jumlah penduduk meningkat maka akan berpengaruh penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2011), pada penelitian tersebut di nyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan ini dimungkinkan ada nya perbedaan produktifitas orang pada suatu daerah. Pada dasar nya jika penigkatan jumlah penduduk jika tidak di imbangi dengan penyerapan tenaga kerja maka akan terjadi peningkatan jumlah pengganggguran. Jika terjadi pengganggguran maka dampak nya yang akan terjadi selanjut nya adalah kemiskinan. Di D.I Yogyakarta dalam penelitian ini pengaruh jumlah penduduk berbading terbalik terhadap jumlah penduduk miskin itu mungkin karena semakin banyak penduduk di yogyakarta akan terserap dan menghasilkan barang dan jasa yang berakibat pada pengentasan kemiskinan.

4.7.5 Analisis kinerja fiskal terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta

Hasil dari regresi data panel pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan kinerja fiskal yang di wakili oleh variabel – variabel perhitungan nya dengan uji F signifikan berpengaruh secara bersama – sama terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya ketika jumlah penduduk meningkat maka akan berpengaruh meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh(Sriyana, 2015), pada penelitian tersebut di nyatakan bahwa kinerja fiskal dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dengan menurunkan kemiskinan. Meskipun dengan memasukkan variabel variabel yang berbeda dan kurun waktu berbeda tetap saja kinerja fiskal dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum secara individu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dana alokasi umum mengalami kenaikkan maka akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta, demikian sebaliknya.
2. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan asli daerah naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun.
3. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahawa Produk domestik regional bruto secara individu perpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Produk domestik regional bruto maka akan berpengaruh terhadap

peningkatan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta demikian pula sebaliknya.

4. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah penduduk naik akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta demikian pula sebaliknya.
5. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada suatu yang mempengaruhi kinerja fiskal akan berdampak pada kemiskinan.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta tahun 2006-2015 terdapat beberapa implikasi diantaranya :

1. Pemerintah harus terus berupaya dalam meningkatkan pengelolaan dana alokasi umum agar tercapai nya suatu tujuan yaitu pemerataan dan peningkatan ekonomi. Dengan menigkat nya perekonomian maka kemiskinan akan semakin berkurang. Dengan berkurang nya kemiskinan maka akan tercipta kersejah teraan bersama. Meskipun dalam pembahasan

kemiskinan tidak di pengaruhi secara langsung oleh dana alokasi umum maka dari itu pemerintah juga harus mengatur pergerakan dana alokasi umum agar sesuai dengan tujuan.

2. Pemerintah sudah sesuai dengan yang di harapkan tetapi masih perlu di kaji lagi mengenai dampak dari pendapatan asli daerah. Karena pada hasil pembahasan besaran jumlah pendapatan asli daerah justru akan semakin mengurangi kemiskinan hal ini di mungkinkan karena pengunaan nya yang tepat.
3. Pemerintah harus tetap menjaga mementum peningkatan produk domestik regional bruto untuk mengjaga kemiskinan. Karena semakin pemerintah mendorong pertumbuhan barang dan jasa maka tidak akan dapat menyerap tenaga kerja akhir nya akan menjadi miskin.
4. Pemerintah harus dapat meningkatkan jumlah penduduk untuk dapat terus menekan angka kemiskian. Dalam hal ini penigkatan jumlah penduduk dengan menjadikann nya sebagai faktor output agar terserap oleh pasar tenaga kerja dan dapat menigkat kan kesejahteraan nya .
5. Pemerintah harus terus mengawasi Kinerja fiskal karena sangat berdampak kepada jumlah penduduk miskin. Kinerja fiskal yang sesuai di harapkan pemerintah maka akan menghasil kan tujuan yang bagus juga. Meskipun variabel – variabel kinerja fiskal pengaruh nya terhadap kemiskinan berbeda – beda.

DAFTAR PUSTAKA

Chodariyanti, L. (2015), "Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013", Jurnal Ekbis, Vol *XIV* (2) .677–689.

Cholili, F. M. (2014), "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,Vol *22*(1).

Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013), "Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan", Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, Vol14(1). 1–26.

Maipita, I., Janta, M. D., & Razak, N. A. A. (2010), "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Di Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan,Vol12(4). 422–456.

Mustika, C. (2011). "Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990 - 2008", Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol 1(4). 12–23.

Rahmawati, S. (2016), Ekonomi Sumberdaya Manusia, kemiskinan dan Kesehatan Perspektif di Indonesia, 1st ed. deepublish. Yogyakarta.

Santosa, B. (2013), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia", Keuangan Dan Bisnis, Vol *5*(2). 130–143.

Saragih, J. P. (2003), Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. (M. S. Khadafi, Ed.)1st ed. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sriyana, J. (2011), "Kinerja Fiskal Daerah: Kasus Kabupaten dan Kota di Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Vol*15*(2). 119–130.

Sriyana, J. (2014), Metode Regresi Data Panel, 1st ed. Ekonisia. Yogyakarta.

Sriyana, J. (2015), "kapasitas fiskal dan pengentasan kemiskinan sebuah analisa data panel untuk daerah istimewa yogyakarta indonesia", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 16(1). 1–10.

Suliswanto, M. S. W. (2010), "Pengaruh Produk Domestik Broto (PDB) dan Indeks Pembangunana Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol8(2). 357–366.

LAMPIRAN

Lampiran I Estimasi *Output Hasil Regresi Common Effect Model*

Estimasi *Output* Hasil Regresi *Common Effect Model*

Dependent Variable: KMIS?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/16/17 Time: 10:42
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.245984	10.78987	-0.115477	0.9086
DAU?	1.70E-07	2.61E-08	6.528221	0.0000
PAD?	-9.99E-08	3.49E-08	-2.863235	0.0063
PDRB?	-3.07E-06	8.09E-07	-3.802438	0.0004
POP?	9.24E-05	1.43E-05	6.447523	0.0000

R-squared	0.804467	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.787086	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	20.08500	Akaike info criterion	8.932463
Sum squared resid	18153.32	Schwarz criterion	9.123665
Log likelihood	-218.3116	Hannan-Quinn criter.	9.005274
F-statistic	46.28496	Durbin-Watson stat	0.893750
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran II Estimasi *Output* Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Estimasi *Output* Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: KMIS?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/16/17 Time: 12:20
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.24569	42.67967	1.950476	0.0599
DAU?	2.25E-07	8.36E-08	2.693669	0.0112
PAD?	-1.32E-07	3.14E-08	-4.216301	0.0002
PDRB?	1.72E-06	1.02E-06	1.685994	0.1015
POP?	-0.000150	6.15E-05	-2.444716	0.0202
Fixed Effects (Cross)				
_YK--C	-76.88362			
_SL--C	41.17184			
_BA--C	56.73814			
_KP--C	-36.54562			
_GK--C	15.51926			
Fixed Effects (Period)				
2006--C	42.92472			
2007--C	18.61616			
2008--C	4.849217			
2009--C	23.80605			
2010--C	15.73420			
2011--C	2.305400			
2012--C	-12.96140			
2013--C	-31.00710			
2014--C	-33.72402			
2015--C	-30.54322			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.926593	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.887596	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	14.59353	Akaike info criterion	8.472746
Sum squared resid	6815.075	Schwarz criterion	9.161075
Log likelihood	-193.8187	Hannan-Quinn criter.	8.734866
F-statistic	23.76046	Durbin-Watson stat	1.673220
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran III Estimasi *Output* Hasil Regresi *Random Effect Model*

Estimasi *Output* Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: KMIS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/16/17 Time: 12:26
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.245984	8.160291	-0.152689	0.8793
DAU?	1.70E-07	1.97E-08	8.631883	0.0000
PAD?	-9.99E-08	2.64E-08	-3.785887	0.0005
PDRB?	-3.07E-06	6.12E-07	-5.027740	0.0000
POP?	9.24E-05	1.08E-05	8.525180	0.0000
Random Effects (Cross)				
_YK--C	-4.98E-11			
_SL--C	-8.38E-11			
_BA--C	1.04E-10			
_KP--C	-2.02E-11			
_GK--C	4.98E-11			

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	1.49E-05	0.0000
Idiosyncratic random	15.19012	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.804467	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.787086	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	20.08500	Sum squared resid	18153.32
F-statistic	46.28496	Durbin-Watson stat	0.893750
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.804467	Mean dependent var	108.8202
Sum squared resid	18153.32	Durbin-Watson stat	0.893750

Lampiran IV Hasil Pengujian *Chow Test*

Hasil Pengujian *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FEM
Test cross-section and period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.257856	(4,32)	0.0001
Cross-section Chi-square	35.456736	4	0.0000
Period F	1.380077	(9,32)	0.2379
Period Chi-square	16.398481	9	0.0590
Cross-Section/Period F	4.095262	(13,32)	0.0006
Cross-Section/Period Chi-square	48.985812	13	0.0000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.69957	31.91125	-2.309517	0.0268
DAU?	3.82E-07	8.99E-08	4.243929	0.0001
PAD?	-1.51E-07	4.15E-08	-3.649474	0.0008
PDRB?	-1.40E-06	1.05E-06	-1.331886	0.1913
POP?	7.43E-07	3.96E-05	0.018773	0.9851

Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.850821	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.796950	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	19.61421	Akaike info criterion	9.021881
Sum squared resid	13849.81	Schwarz criterion	9.557248
Log likelihood	-211.5470	Hannan-Quinn criter.	9.225752
F-statistic	15.79387	Durbin-Watson stat	0.864807
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran V Hasil Pengujian *Hausmen Test*

Hasil Pengujian *Hausmen Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.674468	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
DAU?	0.000000	0.000000	0.000000	0.0000
PAD?	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0000
PDRB?	0.000000	-0.000003	0.000000	0.0000
POP?	-0.000064	0.000092	0.000000	0.0024

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: KMIS?
Method: Panel Least Squares
Date: 02/24/18 Time: 11:00
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	129.7623	34.27984	3.785383	0.0005
DAU?	5.63E-08	3.10E-08	1.818135	0.0764
PAD?	-8.17E-08	2.66E-08	-3.067053	0.0038
PDRB?	4.36E-07	8.80E-07	0.495016	0.6232
POP?	-6.43E-05	5.27E-05	-1.220984	0.2291

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.898101	Mean dependent var	108.8202
Adjusted R-squared	0.878218	S.D. dependent var	43.52809
S.E. of regression	15.19012	Akaike info criterion	8.440716
Sum squared resid	9460.325	Schwarz criterion	8.784880
Log likelihood	-202.0179	Hannan-Quinn criter.	8.571776
F-statistic	45.16981	Durbin-Watson stat	1.433594
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran VI

Data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Miskin D.I Yogyakarta

Daerah	Tahun	DAU (000)	PAD (000)	PDRB (000.000)	POP	KMIS(000)
Yogyakarta	2006	316.832.000	96.551.930	7.732.639	443.112	45,20
Yogyakarta	2007	365.042.000	114.098.350	8.599.468	451.118	42,90
Yogyakarta	2008	411.257.230	132.427.040	9.806.813	456.915	48,10
Yogyakarta	2009	414.345.330	161.482.440	10.607.237	462.752	45,30
Yogyakarta	2010	395.444.060	179.423.640	11.777.579	388.627	37,80
Yogyakarta	2011	436.129.820	228.833.290	12.962.435	390.554	37,74
Yogyakarta	2012	536.466.615	338.839.610	14.327.564	394.012	37,70
Yogyakarta	2013	597.212.216	385.920.170	22.537.792	402.679	36,60
Yogyakarta	2014	618.742.352	470.634.760	24.664.285	400.467	36,60
Yogyakarta	2015	622.365.350	510.548.830	26.792.641	412.704	36,00
Sleman	2006	485.397.000	120.951.407	8.898.867	915.416	128,10
Sleman	2007	543.065.000	120.951.408	9.972.193	928.471	125,40
Sleman	2008	592.594.528	138.637.705	11.446.071	945.754	125,00
Sleman	2009	587.857.778	157.321.267	12.503.760	1.103.119	117,50
Sleman	2010	563.320.892	163.632.984	13.611.725	1.117.175	117,00
Sleman	2011	631.920.733	226.723.271	23.764.366	1.107.304	117,32
Sleman	2012	795.708.767	301.069.539	25.732.248	1.114.833	118,00

Sleman	2013	891.589.912	455.998.564	28.295.362	1.107.304	111,00
Sleman	2014	952.102.502	573.337.599	31.013.893	1.163.970	110,00
Sleman	2015	984.410.612	643.130.079	33.826.505	1.167.481	110,96
Bantul	2006	470.847.000	44.005.312	5.722.466	820541	178,20
Bantul	2007	524.293.000	57.229.726	6.409.648	831657	169,30
Bantul	2008	583.169.351	69.800.761	7.417.980	856206	164,30
Bantul	2009	568.502.143	88.691.362	8.147.860	876172	158,50
Bantul	2010	573.512.337	81.637.099	9.076.401	911503	146,90
Bantul	2011	625.060.827	128.900.086	13.290.666	921.263	127,48
Bantul	2012	768.034.584	166.597.778	14.510.832	930.276	159,16
Bantul	2013	854.810.634	224.197.864	16.138.755	955.015	156,61
Bantul	2014	949.252.188	357.411.062	17.682.924	968.632	153,91
Bantul	2015	942.850.827	390.624.492	19.325.203	971.511	160,20
Kulon Progo	2006	344.035.000	35.203.275	2.414.960	458.674	106,10
Kulon Progo	2007	378.145.129	38.637.833	2.672.861	374.445	103,80
Kulon Progo	2008	403.656.783	42.289.208	3.038.165	388.869	97,90
Kulon Progo	2009	413.081.642	39.358.629	3.286.278	374.921	89,90
Kulon Progo	2010	411.293.618	48.190.801	3.547.055	388.869	90,10
Kulon Progo	2011	444.043.865	53.752.293	5.500.250	393.796	92,76
Kulon Progo	2012	531.104.016	74.028.663	5.916.574	391.436	93,21
Kulon Progo	2013	594.978.790	95.991.512	6.489.593	403.179	86,50

Kulon Progo	2014	639.409.211	158.623.927	7.056.571	407.709	84,67
Kulon Progo	2015	657.260.489	170.822.326	7.671.548	412.198	88,13
Gunung Kidul	2006	504.395.748	504.395.748	4.390.868	683.389	95,72
Gunung Kidul	2007	459.851.000	28.878.356	4.872.123	685.210	95,72
Gunung Kidul	2008	504.395.748	32.907.614	5.502.208	686.772	74,63
Gunung Kidul	2009	508.212.308	38.455.406	5.987.782	688.145	163,70
Gunung Kidul	2010	521.293.704	42.521.521	9.808.630	675.382	148,70
Gunung Kidul	2011	572.008.916	54.462.418	9.739.094	685.003	157,09
Gunung Kidul	2012	687.944.489	67.050.781	10.545.354	692.579	157,80
Gunung Kidul	2013	779.069.238	83.427.448	11.530.340	700.191	152,40
Gunung Kidul	2014	847.388.294	159.304.338	12.557.371	707.794	148,39
Gunung Kidul	2015	872.566.961	196.099.244	13.798.656	715.282	155,00

Lampiran VII

Data Jumlah penduduk miskin (dalam ribu jiwa) pada tahun 2006-2015

Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010
Kulon Progo	106,10	103,80	97,90	89,90	90,10
Bantul	178,20	169,30	164,30	158,50	146,90
Gunung Kidul	95,72	95,72	74,63	163,70	148,70
Sleman	128,10	125,40	125,00	117,50	117,00
Yogyakarta	45,20	42,90	48,10	45,30	37,80

Kabupaten/kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	92,76	93,21	86,50	84,67	88,13
Bantul	127,48	159,16	156,61	153,91	160,20
Gunung Kidul	157,09	157,80	152,40	148,39	155,00
Sleman	117,32	118,00	111,00	110,00	110,96
Yogyakarta	37,74	37,70	36,60	36,60	36,00

Lampiran VIII

Data dana alokasi umum (dalam ribu rupiah) pada tahun 2006-2015

Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010
Kulon Progo	344.035.000	378.145.129	403.656.783	413.081.642	411.293.618
Bantul	470.847.000	524.293.000	583.169.351	568.502.143	573.512.337
Gunung Kidul	504.395.748	459.851.000	504.395.748	508.212.308	521.293.704
Sleman	485.397.000	543.065.000	592.594.528	587.857.778	563.320.892
Yogyakarta	316.832.000	365.042.000	411.257.230	414.345.330	395.444.060

Kabupaten/kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	444.043.865	531.104.016	594.978.790	639.409.211	657.260.489
Bantul	625.060.827	768.034.584	854.810.634	949.252.188	942.850.827
Gunung Kidul	572.008.916	687.944.489	779.069.238	847.388.294	872.566.961
Sleman	631.920.733	795.708.767	891.589.912	952.102.502	984.410.612
Yogyakarta	436.129.820	536.466.615	597.212.216	618.742.352	622.365.350

Lampiran IX

Data Pendapatan Asli Daerah (dalam ribu rupah) pada tahun 2006-2015.

Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010
Kulon Progo	35.203.275	38.637.833	42.289.208	39.358.629	48.190.801
Bantul	44.005.312	57.229.726	69.800.761	88.691.362	81.637.099
Gunung Kidul	504.395.748	28.878.356	32.907.614	38.455.406	42.521.521
Sleman	120.951.407	120.951.408	138.637.705	157.321.267	163.632.984
Yogyakarta	96.551.930	114.098.350	132.427.040	161.482.440	179.423.640

Kabupaten/kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	53.752.293	74.028.663	95.991.512	158.623.927	170.822.326
Bantul	128.900.086	166.597.778	224.197.864	357.411.062	390.624.492
Gunung Kidul	54.462.418	67.050.781	83.427.448	159.304.338	196.099.244
Sleman	226.723.271	301.069.539	455.998.564	573.337.599	643.130.079
Yogyakarta	228.833.290	338.839.610	385.920.170	470.634.760	510.548.830

Lampiran X

Data PDRB (dalam juta rupiah) harga berlaku pada tahun 2006-2015.

Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010
Kulon Progo	2.414.960	2.672.861	3.038.165	3.286.278	3.547.055
Bantul	5.722.466	6.409.648	7.417.980	8.147.860	9.076.401
Gunung Kidul	4.390.868	4.872.123	5.502.208	5.987.782	9.808.630
Sleman	8.898.867	9.972.193	11.446.071	12.503.760	13.611.725
Yogyakarta	7.732.639	8.599.468	9.806.813	10.607.237	11.777.579

Kabupaten/kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	5.500.250	5.916.574	6.489.593	7.056.571	7.671.548
Bantul	13.290.666	14.510.832	16.138.755	17.682.924	19.325.203
Gunung Kidul	9.739.094	10.545.354	11.530.340	12.557.371	13.798.656
Sleman	23.764.366	25.732.248	28.295.362	31.013.893	33.826.505
Yogyakarta	12.962.435	14.327.564	22.537.792	24.664.285	26.792.641

Lampiran XI

Data Jumlah Penduduk (jiwa) pada tahun 2006-2015.

Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010
Kulon Progo	458.674	374.445	388.869	374.921	388.869
Bantul	820541	831657	856206	876172	911503
Gunung Kidul	683.389	685.210	686.772	688.145	675.382
Sleman	915.416	928.471	945.754	1.103.119	1.117.175
Yogyakarta	443.112	451.118	456.915	462.752	388.627

Kabupaten/kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	393.796	391.436	403.179	407.709	412.198
Bantul	921.263	930.276	955.015	968.632	971.511
Gunung Kidul	685.003	692.579	700.191	707.794	715.282
Sleman	1.107.304	1.114.833	1.107.304	1.163.970	1.167.481
Yogyakarta	390.554	394.012	402.679	400.467	412.704